

Kebijakan Publik

DRA. TRIDAYA RINI, M.SI.

A. Kebijakan Publik

1. **Dye** : “Whatever government choose to do or not to do”

Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh → Diamnya pemerintah itu merupakan kebijakan

Intrepretasi

- ▶ Kebijakan haruslah dilakukan pemerintah
- ▶ Kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan

A. Kebijakan Publik

2. **James E. Anderson** : Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kebijakan tertentu

Kebijakan tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum

3. **Laswell** : Kebijakan public mencakup
 - a. Metode penelitian proses kebijakan
 - b. Hasil dari studi kebijakan
 - c. Hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang

A. Kebijakan Publik

4. Carl J. Friedrich

Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuasaan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Kebijakan → sebagai suatu tindak yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Tahap-tahap analisis kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

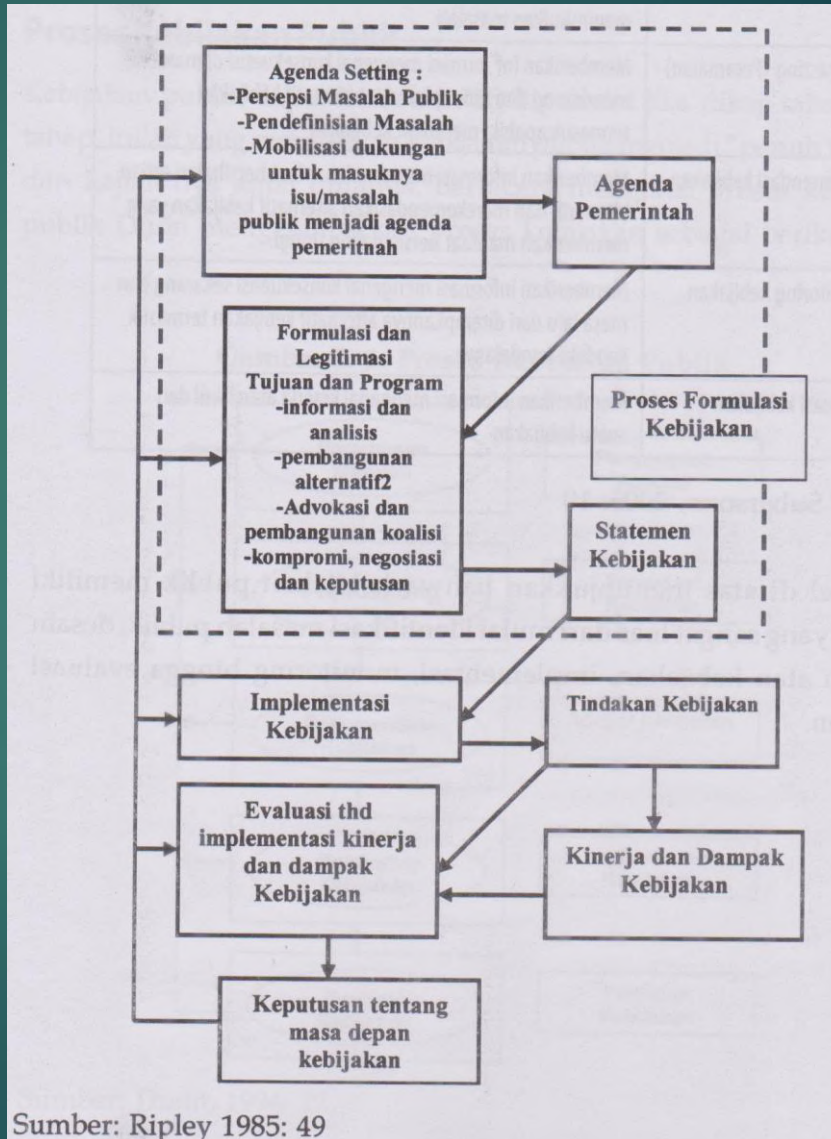
C. Model kebijakan

1. Model formulasi kebijakan (Ripley)
2. Model sistem politik David Easton
3. Model implementasi George Edward III

C. Model kebijakan

(1. Ripley)

Tahapan kebijakan publik (Ripley)



Sumber: Ripley 1985: 49

C. Model kebijakan (1. Ripley)

Model tahapan kebijakan Ripley, ada dua proses kebijakan

a. Siklus pendek :

1. Penyusunan agenda kebijakan
2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi kebijakan pemerintah
4. Kebijakan

C. Model kebijakan (1. Ripley)

Model tahapan kebijakan Ripple, ada dua proses kebijakan

b. Siklus Panjang

1. Penyusunan agenda pemerintah
2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi
4. Kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Tindakan kebijakan
7. Kinerja dan dampak kebijakan
8. Evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan
9. Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru)

C. Model kebijakan (1. Ripley)

Fase penyusunan agenda (agenda setting)

1. Persepsi masalah public

Menunjuk bagaimana isu masalah public dipersepsikan oleh masyarakat, termasuk isu atau masalah pentingkah, seriuskah atau biasa-biasa saja.

2. Pendefinisian masalah

Menunjuk adanya pembatasan masalah yang dilakukan public sendiri

3. Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah public menjadi agenda pemerintah

Menunjuk upaya dari masyarakat untuk memasukkan masalah atau isu public tertentu ke dalam agenda pemerintah

C. Model kebijakan (1. Ripley)

Setelah masalah public masuk agenda pemerintah → masalah tersebut harus melewati mekanisme politik untuk mendapatkan solusi terbaik → fase ini disebut tahapan formulasi dan legitimasi.

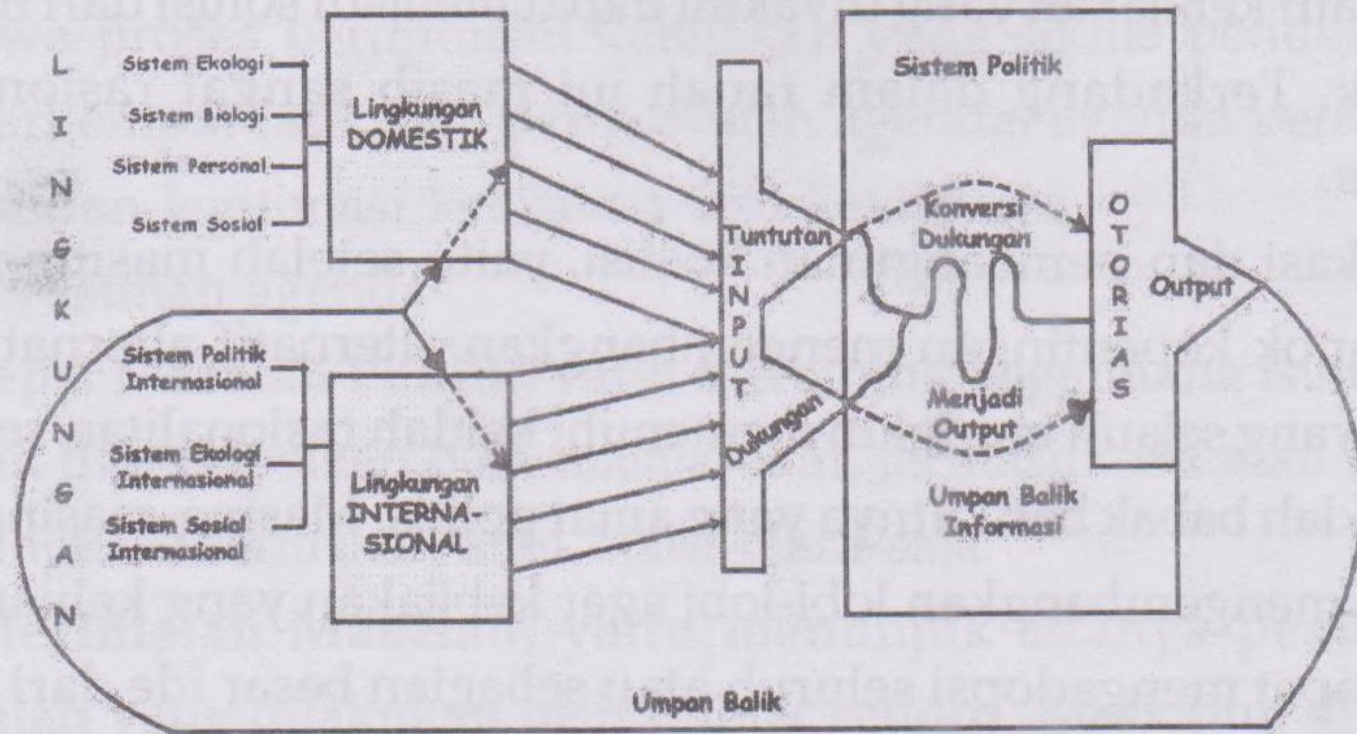
Adapun fase-fase yang harus dilalui :

1. Tujuan dan program
2. Informasi dan analisis
3. Pembangunan alternative
4. Advokasi dan pembentukan koalisi
5. Kompromi, negosiasi, dan keputusan

C. Model kebijakan (2. David Easton)

12

Gambar 2.3. Model Sistem David Easton



Sumber: David Easton dalam Anderson, 1979: 16

C. Model kebijakan (2. David Easton)

Ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya menganalisa kebijakan

1. Mencakup masalah rumit, kompleks, dan struktur yang sulit diidentifikasi

Misal : angka putus sekolah (tinggi biaya Pendidikan, kemiskinan perspektif tentang Pendidikan, budaya, kenakalan remaja, dll.)

2. Kriteria kepentingan public

Contoh : masalah sampah, dikota x tidak masalah, dikota y menjadi masalah

C. Model kebijakan

Kesamaan model Ripley dan Easton

1. Proses bermula dari dukungan pada saat isu public berjalan hingga masuk dalam agenda pemerintahan
2. Easton memiliki black box dapat diungkap dalam tahapan formulasi dan legitimasi dalam Riple

C. Model kebijakan

Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton

Aspek	Ruang Lingkup
Lingkungan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Setting Permasalahan dari para Aktor dan Aktor yang dominan (struktur kekuatan politik, anggota dewan, mahasiswa, wartawan dan kelompok kepentingan lainnya).<ul style="list-style-type: none">○ Bagaimanakah struktur politik saat kebijakan di ambil, partai politik mana yang paling besar kekuatannya di legislatif, berapa persen kekuatan oposisi, seberapa kuat posisi wartawan dalam mempengaruhi publik, dan adakah kelompok oposisi non parlemen yang dapat menjadi oposisi di luar parlemen (seperti mahasiswa dan NGO)

C. Model kebijakan

Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton

Aspek	Ruang Lingkup
Seting Agenda	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dari para aktor dan persepsi masing-masing terhadap Masalah Publik.<ul style="list-style-type: none">○ Bagaimanakah respon awal dari para aktor terhadap suatu masalah publik tertentu.• Pendefinisian dan batasan Masalah oleh para aktor.<ul style="list-style-type: none">○ Bagaimana para aktor memandang suatu masalah, batasan dan definisi yang diberikan aktor atas masalah publik tersebut.• Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah.<ul style="list-style-type: none">○ Siapakah yang paling getol mendesakkan kepentingannya dalam isu masalah publik tersebut, bagaimana aktor tersebut memperkuat tekanan untuk masuknya agenda tersebut dalam agenda pemerintah

C. Model kebijakan

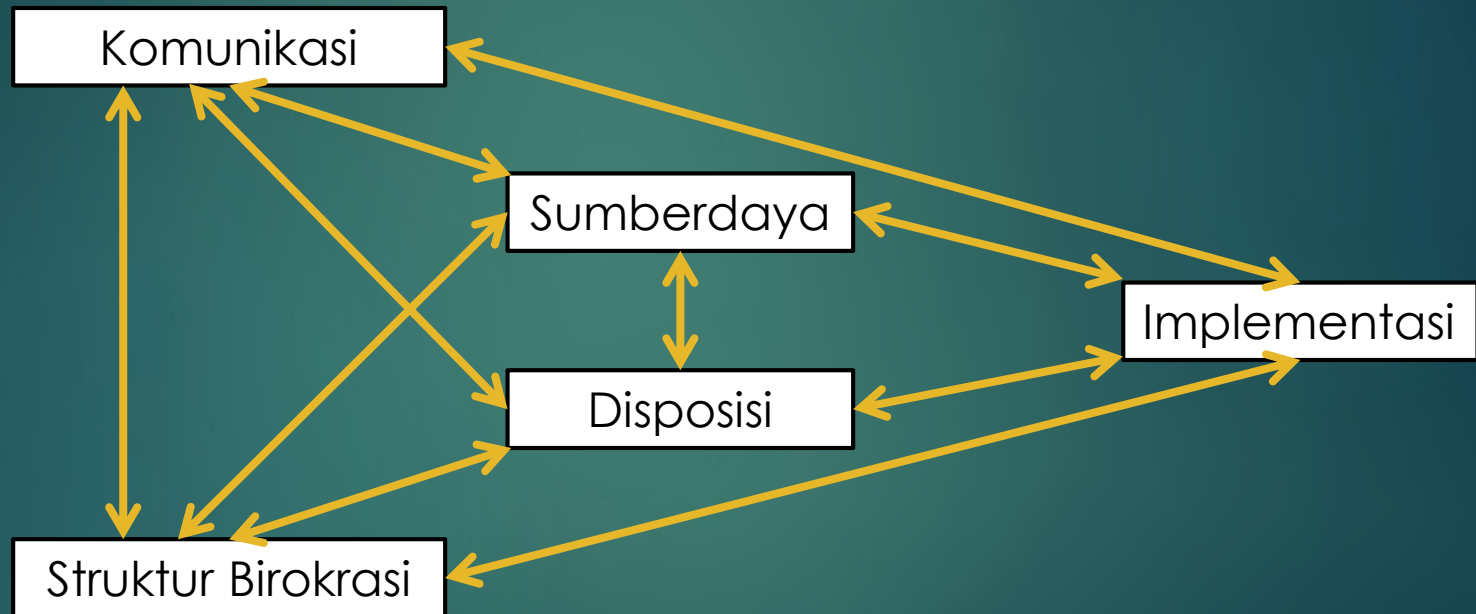
Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton

Formulasi dan Legitimasi	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan dan Program .<ul style="list-style-type: none">○ Bagaimana desain dari para aktor sebagai solusi dari masalah publik.• Kelengkapan informasi dan kecerdasan analisis kebijakan,<ul style="list-style-type: none">○ seberapa lengkap informasi yang diperoleh para aktor dan seberapa cerdas aktor tersebut menganalisis masalah publik.• Pembangunan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dari masalah publik yang dihadapi,<ul style="list-style-type: none">○ berapa alternatif yang dapat dikembangkan, apa perbedaan dan kesamaan alternatif antar aktor• Advokasi dan pembangunan koalisi,<ul style="list-style-type: none">○ bagaimana masing-masing aktor membuat jejaring untuk menggolkan alternatif kebijakannya diterima sebagai kebijakan.• Kompromi, negosiasi dan keputusan,<ul style="list-style-type: none">○ bagaimana kebijakan akhirnya diambil melalui mekanisme mufakat, lobi atau votingkah kebijakan diambil. Jika memungkinkan juga dapat mengetahui deal-deal politik tertentu yang mengakibatkan kebijakan tersebut disetujui sebagai kebijakan yang diambil pemerintah.
--------------------------	---

C. Model kebijakan (3. George Edward III)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Model kebijakan (3. George Edward III)



C. Model kebijakan (3. George Edward III)

► Aplikasi konseptual model Edward III

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/ kebijakan? b. Bagaimana sosialisasi program/ kebijakan efektif dijalankan? <ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan • Intensitas komunikasi
Sumber daya	a. Kemampuan implementor <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program • Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b. Ketersediaan Dana <ul style="list-style-type: none"> • Berapa dana yang dialokasikan • Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/ kebijakan.

C. Model kebijakan (3. George Edward III)

► Aplikasi konseptual model Edward III

Disposisi	<p>Karakter pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat komitmen dan kejujuran: dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. • Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

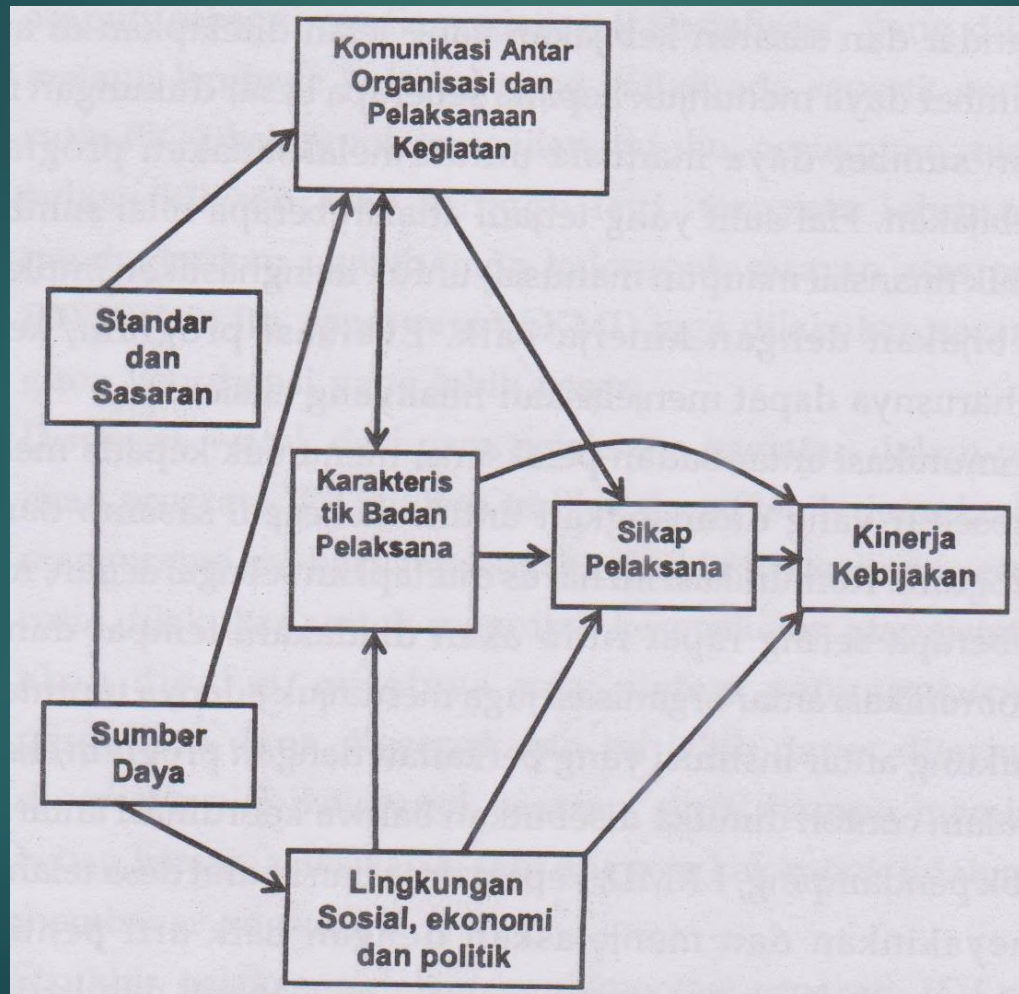
C. Model kebijakan

(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes and Van Horn)

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Kinerja kebijakan
3. Sumber daya
4. Komunikasi antar pelaksana
5. Karakteristik badan pelaksana
6. Lingkungan social
7. Sikap pelaksanaan

C. Model kebijakan

(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes and Van Horn)



C. Model kebijakan

(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes and Van Horn)

No.	Hubungan antar variabel	Diskripsi
1.	Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik	Banyak penduduk desa tiba-tiba menjadi miskin dan ingin mendapat BLT. Hal ini terkait dengan tersedianya sumber daya finansial yang dijanjikan dan lingkungan sosial secara cepat menangkap peluang apalagi ekonomi belum cukup kuat.
2.	Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana	Sumber daya untuk melakukan koordinasi ternyata tidak disediakan sehingga komunikasi antar badan pelaksana juga tidak terjadi secara baik dan efektif. Banyak Ketua RT tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan BLT sesuai dengan jumlah penerima di RT -nya dan bagaimana penentuannya, dia sendiri tidak tau.
3.	Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana,	Ekonomi yang belum mapan dan adanya demokratisasi yang kuat (lingkungan sosial, ekonomi dan politik) menjadikan para badan pelaksana menjadi toleran terhadap para "orang miskin baru" yang meminta BLT. Pendataan ulang yang dilakukan bukan untuk mengklarifikasi orang miskin namun memastikan bahwa tidak ada usulan yang ditolak.
4.	Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana	Jika pada point 3, lingkungan mempengaruhi badan pelaksana, maka pada point 4 ini, mempengaruhi sikap pelaksana. Pelaksana yang merasa "terancam" dengan desakan "orang miskin baru" akan bersikap moderat dan memenuhi setiap tuntutan.
5.	Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.	Secara langsung lingkungan sosial, politik dan ekonomi ini dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. BLT yang tersalurkan bukan kepada yang berhak menjadikan logika subsidi bagi orang miskin secara langsung menjadi runtuh. Kebijakan ini secara logika jelas gagal sebagai pengalihan dari subsidi tidak langsung menjadi langsung kepada orang miskin.

C. Model kebijakan

(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes and Van Horn)

No.	Hubungan antar variabel	Diskripsi
6.	Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana	Komunikasi yang tidak berjalan efektif menjadikan Pak RT memasukkan anggota masyarakat sebanyak - banyaknya. Karena hal ini bukanlah yang "terlarang" (menurut kesepakatan mereka dengan warga). Sebaliknya karakter badan pelaksana (RT misalnya), yang tidak peduli dengan kinerja kebijakan secara utuh akan sangat minim perhatiannya terhadap komunikasi antar badan pelaksana yang lain.
7.	Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana	Pak RT amat resisten jika dipanggil untuk rapat dan dimintai tanggung jawab atas daftar orang miskin yang telah diusulkan.
8.	Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana	Sikap Kelurahan dan RT sebagai badan pelaksana yang cenderung diam dan moderat terhadap lahirnya "orang miskin baru" akan mempengaruhi person -person didalamnya. Pak lurah dan aparatnya merasa lebih amat jika bersikap diam atas lahirnya "orang miskin baru".
9.	Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.	Secara langsung, sikap kelurahan dan RT sebagai badan pelaksana yang cenderung diam dan moderat terhadap orang miskin baru akan mempengaruhi penambahan orang miskin dalam daftar orang yang berhak menerima BLT. Akhirnya, banyak orang yang tidak berhak menerima, menerima BLT bahkan demi kata kebersamaan uang BLT dibagi rata atas daftar warga yang telah terdaftar.